



PANCASILA SEBAGAI LANDASAN ILMU POLITIK

Muhammad Hafizt Romandes

Universitas Sumatera Utara

Email Korespondensi: romandeshafizt@gmail.com

Abstract

Pancasila as the basis of the Indonesian state has an important role in the development of political science in Indonesia. This article aims to analyze how Pancasila functions as a foundation for political science, as well as its implications for the government system and national life. The method used in this research is qualitative analysis with a literature study approach and a review of related laws and regulations. The research results show that Pancasila values provide direction and foundation for political practice in Indonesia, as well as strengthening national identity and national unity.

Keywords: Pancasila, state philosophy, foundation, political science.

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu politik di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam ilmu politik, serta implikasinya terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan telah terhadap Undang-Undang yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan arah dan landasan bagi praktik politik di Indonesia, serta memperkuat identitas nasional dan persatuan bangsa.

Kata kunci: pancasila, dasar negara, landasan, ilmu politik.

Pendahuluan

Pancasila, yang ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, merupakan suatu sistem nilai yang mengandung prinsip-prinsip fundamental yang harus dipegang oleh seluruh warga negara. Dalam konteks ilmu politik, Pancasila berfungsi sebagai landasan yang mengarahkan praktik politik, pembuatan kebijakan, dan interaksi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah, memiliki implikasi yang mendalam terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan politik di Indonesia. Artikel ini akan membahas peran Pancasila sebagai landasan ilmu politik di Indonesia.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk identitas dan karakter bangsa. Ditetapkan pada tahun 1945, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan etika, tetapi juga sebagai landasan filosofis yang mengarahkan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ilmu politik. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi acuan bagi praktik politik, pembuatan kebijakan, dan interaksi sosial di Indonesia.

Sebagai suatu ideologi, Pancasila mengandung nilai-nilai yang mencerminkan karakter dan identitas bangsa Indonesia. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila — Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia — memberikan arah dan landasan bagi sistem politik yang demokratis dan inklusif.

Pancasila berfungsi sebagai fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan musyawarah, Pancasila mendorong terciptanya iklim politik yang sehat dan berkeadaban. Oleh karena itu, pemahaman yang



mendalam tentang Pancasila sebagai landasan ilmu politik sangat penting untuk membangun masyarakat yang berkeadilan dan beradab, serta untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai peran Pancasila sebagai landasan ilmu politik, serta implikasinya terhadap praktik politik dan sistem pemerintahan di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya Pancasila dalam konteks politik dan tata kelola negara.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka, termasuk buku, artikel, dan dokumen hukum yang relevan. Selain itu, telaah terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan Pancasila dan sistem politik Indonesia juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

1. Kajian Literatur: Analisis teks, artikel, buku, dan literatur lain yang relevan dengan Pancasila.
2. Analisis Filosofis: Mengkaji nilai-nilai dasar Pancasila secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
3. Studi Kasus: Mengamati penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai konteks sosial, politik, dan budaya.
4. Survei dan Wawancara: Mengumpulkan data melalui kuesioner dan wawancara dengan berbagai pihak terkait.

Pembahasan

Telaah Undang-Undang

Pancasila sebagai dasar negara diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam konteks politik, Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pasal-pasal dalam UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial, mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang harus diimplementasikan dalam praktik politik.

Telaah UUD Tentang Pancasila Sebagai Landasan Ilmu Politik:

1. Pancasila dan UUD 1945 sebagai Landasan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Implementasinya dalam UU yang Mengatur Kehidupan Bernegara di Indonesia - Makalah ini menjelaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan sistem ketatanegaraan dan implementasinya dalam berbagai undang-undang di Indonesia.
2. Pancasila sebagai Dasar Negara: Sebuah Telaah Yuridis - Artikel ini membahas tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia.
3. Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia - Makalah ini membahas tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila harus teraktualisasi dalam substansi, struktur, dan budaya hukum di Indonesia.

Pancasila memberikan landasan yang kuat bagi praktik politik di Indonesia melalui beberapa aspek, antara lain:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Menegaskan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam politik.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan politik.
3. Persatuan Indonesia: Mendorong terciptanya kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia.



4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mengharuskan adanya distribusi kekayaan dan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat.
6. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi kerangka kerja yang mengarahkan pembuatan kebijakan dan praktik politik di Indonesia

Pengertian dan Sejarah Pancasila

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sejarah Pancasila dimulai sejak perumusan oleh Soekarno dan Mohammad Yamin pada masa persiapan kemerdekaan

Pancasila sebagai Ideologi Negara

Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan kerangka kerja moral dan etika bagi penyelenggaraan negara. Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.

Pancasila dalam Sistem Politik

Pancasila menjadi landasan dalam sistem politik Indonesia, yang mencakup berbagai aspek seperti pemilihan umum, pemerintahan, dan peran partai politik. Nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam praktik politik sehari-hari untuk mencapai tujuan nasional.

Telaah Yuridis Pancasila

Dalam konteks hukum, Pancasila dijabarkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi untuk menjaga keselarasan hukum dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Aktualisasi Pancasila

Tantangan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan politik meliputi upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kebijakan dan praktik pemerintahan, serta menjaga relevansinya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan social.

Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu politik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan arahan bagi praktik politik dan pembuatan kebijakan, serta memperkuat identitas nasional dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi para politisi, akademisi, dan masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan politik di Indonesia.

Pancasila sebagai Landasan Ilmu Politik Pancasila, yang terdiri dari lima sila, merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam ilmu politik. Pancasila berfungsi sebagai ideologi yang mengatur nilai-nilai dan prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, yang menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Pancasila juga berfungsi sebagai panduan moral dan etika dalam sistem politik Indonesia, memastikan bahwa semua tindakan politik dan pemerintahan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.



Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. (1989). Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Jakarta: Rajawali.
- Alfian dan Hidayat Mukmin. (1985). Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia serta Peranannya dalam Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Rajawali.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rineke.
- Jujun S. Suriasumantri. (1998). Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar untuk Pemahaman Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Penerbit Universitas Kristen Satya Wacana.
- Kholis Majid, Nur. (2024). Pancasila sebagai Landasan Etika Politik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
- Mulyadi, A. (2018). Pancasila dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 12(1), 45-55.
- Soekarno, B. (1966). Pancasila: Dasar Filsafat Negara. Jakarta: Penerbitan Nasional.
- Soekarno, I. (1945). "Pidato Soekarno tentang Pancasila." - Pidato bersejarah yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara.
- Soepomo, M. (1945). "Pidato Soepomo dalam Sidang PPKI tentang Pancasila sebagai Dasar Negara."- Pidato ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.